

Merespon Krisis Iklim secara Inklusif dan Partisipatoris: Program Keadilan Iklim Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) di Yogyakarta

Faiz Rahmatullah¹

Universitas Gadjah Mada

faizrahmatullah2020@mail.ugm.ac.id

Heri Agus Stianto²

Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Daerah Istimewa Yogyakarta

hstianto@gmail.com

Abstract

Production and consumption emit carbon emissions that increase the Earth's surface temperature. Although it affects all humans, the climate crisis often affects vulnerable groups, such as women and people with disabilities, more. This study aims to explain the impact of the climate crisis and the role of family intervention in addressing the problem. Through a qualitative approach through interviews, observations, and literature studies, this study found that climate justice programs conducted by the Indonesian Family Planning Association in the Special Region of Yogyakarta (PKBI DIY) can intervene in the impact of the climate crisis and create community resilience through an inclusive perspective and participatory program approach. Using the concept of Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI), this program has the potential to form collaborations and shape active community involvement. With funding support from the Ford Foundation, PKBI DIY together with community and government partners has conducted several community empowerment and advocacy activities, such as public discussions, climate crisis assistance, community capacity building, and participatory village policy drafting.

Keywords: Climate crisis, inclusive, participatory, PKBI DIY

Abstrak

Aktivitas produksi dan konsumsi yang dilakukan mengeluarkan emisi karbon yang berdampak

pada meningkatnya suhu permukaan bumi. Meskipun dirasakan oleh semua manusia, krisis iklim seringkali lebih berdampak pada kelompok rentan, seperti perempuan dan disabilitas. Studi ini bertujuan untuk menjelaskan dampak krisis iklim dan peran intervensi keluarga dalam mengatasi masalah tersebut. Melalui pendekatan kualitatif melalui wawancara, observasi, dan studi literatur, studi ini menemukan bahwa program keadilan iklim yang dilakukan oleh Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia di Daerah Istimewa Yogyakarta (PKBI DIY) dapat mengintervensi dampak krisis iklim dan menciptakan resiliensi masyarakat melalui perspektif inklusif dan pendekatan program yang partisipatoris. Dengan menggunakan konsep *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI), program ini memiliki potensi untuk membentuk kolaborasi dan membentuk keterlibatan masyarakat secara aktif. Dengan dukungan dana dari Ford Foundation, PKBI DIY bersama mitra masyarakat dan pemerintah telah melakukan beberapa kegiatan pemberdayaan masyarakat dan advokasi, seperti diskusi publik, pendampingan permasalahan krisis iklim, peningkatan kapasitas masyarakat, dan melakukan drafting kebijakan desa secara partisipatoris.

Kata kunci: Krisis iklim, inklusif, partisipatoris, PKBI DIY

Pendahuluan

Krisis iklim menjadi isu global yang kompleks dan mendesak dengan dampak yang luas bagi kehidupan manusia. Menurut “The Paris Agreement” tahun 2016 krisis iklim disebabkan oleh aktivitas produksi dan konsumsi manusia, seperti pemakaian bahan bakar fosil, industri peternakan, pembalakan liar, bahkan konsumsi pakaian yang tidak bertanggung jawab turut berdampak pada meningkatnya emisi karbon. Dampaknya seperti perubahan pola cuaca ekstrem, kenaikan permukaan laut, dan berbagai fenomena alam lain (The Paris Agreement, 2016). Selain itu, krisis iklim juga berpotensi mengancam ketahanan pangan global. stabilitas sistem pangan dapat terancam karena perubahan iklim akibat variabilitas pasokan jangka pendek (Wheeler & Braun, 2013). Jika itu terjadi, maka kelompok yang paling rentan terdampak seperti kelas bawah, perempuan, dan kelompok difabel.

Dengan demikian, meskipun krisis iklim berdampak pada semua orang, kelompok rentan yang termarginalkan seperti perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat miskin sering menanggung beban yang lebih berat. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk keterbatasan akses terhadap informasi, sumber daya, dan partisipasi dalam proses pengambilan keputusan terkait perubahan iklim. Perempuan, misalnya, dalam perspektif ekofeminisme dianggap memiliki kedekatan dengan alam sekitarnya. Ekofeminisme juga melihat

keterkaitan ini terbentuk atas eksploitasi yang dialami oleh alam dan perempuan diakibatkan sistem patriarki dan kapitalisme. Selain itu, mereka tidak jarang memiliki peran sentral dalam komunitas, seperti bertanggung jawab atas pengadaan air dan makanan (Sultana, 2014). Perempuan dan lingkungan dalam banyak kesempatan dianggap menjadi objek. Keduanya mendapatkan eksploitasi dari berbagai kegiatan.

Dampaknya adalah sumber daya menipis dan pola cuaca tidak menentu, sehingga menjadikan tanggung jawab yang diberikan kepada perempuan semakin berat. Di antara banyak perempuan, mereka yang ada di pedesaan negara berkembang menjadi yang paling rentan. Mereka sering bergantung pada sumber daya alam, bekerja di pertanian dan sekitarnya. Saat krisis iklim terjadi, akan mempengaruhi kehidupan perempuan secara negatif (Terry, 2009). Meskipun PBB sudah berkomitmen untuk memberikan perhatian, namun aspek gender jarang dibahas dalam kebijakan perubahan iklim karena kurangnya pengetahuan gender dan partisipasi perempuan (Hemmati & Röhr, 2009).

Selain perempuan, kelompok disabilitas juga menjadi kelompok rentan yang terdampak krisis iklim. Lebih dari 1 miliar penyandang disabilitas di seluruh dunia, 80% di antaranya tinggal di negara berpendapatan rendah dan menengah (LMICs), mengalami dampak buruk krisis perubahan iklim secara tidak proporsional. Dampak ini dibuktikan dengan disabilitas memiliki tingkat kematian yang jauh lebih tinggi dalam keadaan darurat iklim dibandingkan dengan non-disabilitas. Sayangnya, 81% negara yang mengikuti Paris Agreement tidak menyebutkan disabilitas dalam kontribusi yang ditentukan secara nasional.

Padahal, International Panel on Climate Change (IPCC) 2022 melaporkan bahwa keterlibatan kelompok disabilitas dalam adaptasi krisis iklim dan pendekatan berbasis hak adalah kunci untuk mengatasi marjinalisasi struktural (Stein et al., 2024). Menurut Konvensi Internasional Hak-Hak Penyandang Disabilitas/CRPD, dampak krisis iklim terhadap hak kelompok disabilitas adalah hak partisipasi politik, hak mendapat informasi, dan hak perlindungan sosial (Nainggolan, 2023). Artinya perempuan dan kelompok disabilitas menjadi rentan meskipun mereka tidak berkontribusi dalam munculnya krisis iklim.

Semakin banyak kelompok disabilitas, semakin banyak juga potensi individu yang terdampak krisis iklim. Menurut data Badan Pusat Statistik jumlah orang disabilitas tahun 2023 di Indonesia sebanyak 22,97 juta (Humas, 2024). Dengan angka tersebut semakin banyak kelompok disabilitas yang berpotensi terdampak dari krisis iklim seperti mobilitas saat krisis iklim, minimnya informasi dan layanan untuk adaptasi dengan perubahan iklim. Mengingat kondisi khusus yang dihadapi kelompok rentan tersebut, dibutuhkan pendekatan dan metode kegiatan yang kontekstual. Hal ini sebenarnya sejalan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 5 Ayat (3) Tentang Hak Asasi Manusia, bahwa setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat marjinal berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih.

Namun, kenyataannya jaminan ini masih belum memberikan perlindungan maksimal bagi kelompok tersebut. Dalam keluarga tertentu seperti petani, pemenuhan hak hidup dengan kebutuhan pangan belum sepenuhnya dipenuhi negara. Akibat krisis iklim petani perempuan mengalami penurunan daya beli rumah tangga, sehingga makanan yang tersedia memiliki nutrisi rendah (Arifah et al., 2021). Oleh karena itu, pendekatan partisipatoris dan inklusif yang melibatkan seluruh anggota masyarakat, menjadi penting untuk memastikan keadilan dan keberlanjutan dalam upaya penanganan krisis iklim. Pendekatan ini menekankan pada partisipasi aktif masyarakat dalam proses identifikasi masalah, perumusan solusi, dan pelaksanaan kegiatan. Sebuah program seperti penggunaan media bantal guling bercerita dapat meningkatkan literasi tentang perubahan iklim dari orang tua kepada anak. Sehingga keluarga mengalami peningkatan kesadaran lingkungan (Putra et al., 2024). Pendekatan partisipatoris bertujuan untuk memberdayakan masyarakat agar memiliki kemampuan dan resiliensi dalam menghadapi dampak perubahan iklim.

Salah satu dampak krisis iklim juga terjadi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Berdasarkan data, suhu di DIY mengalami kenaikan 0,08 derajat celcius dalam 100 tahun dan jika tidak ditangani akan berdampak signifikan terhadap kehidupan (Leon, 2024). Salah satu penyebab terbesar krisis iklim di Jogja adalah karbon dari kendaraan bermotor. Pada tahun 2015 saja, sumbangan emisi karbon dari kendaraan pribadi mencapai 60% dari total emisi karbon yang dihasilkan (Agung,

2021). Artinya dengan peningkatan jumlah kendaraan, maka terjadi juga peningkatan emisi karbon di Jogja. Peningkatan suhu dan emisi karbon tersebut menghasilkan penurunan kualitas lingkungan seperti kualitas udara.

Dengan kondisi tersebut, muncul program untuk mengatasi krisis iklim yang dilakukan berbasis keluarga di lakukan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Program ini dimulai sejak tahun 2023 oleh Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Program ini bertujuan untuk mengintervensi dampak krisis iklim dan membangun ketahanan masyarakat. Didukung pendanaan dari Ford Foundation, PKBI DIY bersama dengan mitra masyarakat dan pemerintah telah melaksanakan berbagai kegiatan pemberdayaan dan advokasi masyarakat, seperti diskusi publik, pendampingan berkala terkait isu krisis iklim, peningkatan kapasitas masyarakat untuk meningkatkan adaptasi terhadap krisis iklim, dan penyusunan kebijakan desa secara partisipatif. Studi ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam mengenai bagaimana proses pelaksanaan program keadilan iklim secara inklusif dan partisipatoris dilakukan oleh masyarakat dan dampaknya bagi masyarakat, khususnya perempuan dan disabilitas.

Metode Penelitian

Studi ini menggunakan metode kualitatif yaitu mendeskripsikan temuan fakta dan gejala yang ada secara lengkap. Metode ini bertujuan untuk memahami fenomena yang terjadi pada subjek penelitian, termasuk persepsi, perilaku, tindakan, yang dituliskan secara menyeluruh (Raco, 2010). Studi ini dirancang dengan sifat naturalistik, yaitu data yang diperoleh tidak ada manipulasi dengan tujuan evaluasi, melainkan menilik aktivitas dan proses yang ada secara alamiah (Arifin, 2020).

Lebih lanjut, studi ini dilakukan di 4 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Peneliti merangkum informasi mengenai program dan dampak dari pemberdayaan yang dilakukan melalui dua jenis data, yaitu primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti. Dalam penelitian ini, data primer yang digunakan antara lain: (1) wawancara

kepada 5 orang yang terdiri dari 3 orang mitra masyarakat dan 2 orang pelaksana program; dan (2) melakukan dokumentasi atau pengumpulan data untuk melengkapi hasil wawancara yang meliputi catatan, buku, transkrip, foto, video, serta notulen saat pertemuan dengan masyarakat.

Selanjutnya, data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung (Sugiyono, 2014). Dalam studi ini, data sekunder yang digunakan adalah studi literatur. Studi literatur adalah metode pengumpulan data yang berkaitan dengan mengelola data pustaka dengan cara membaca, mencatat, serta merangkum bahan-bahan penelitian (Zed, 2004). Dalam penelitian ini, literatur yang digunakan meliputi jurnal artikel dan berita yang dirasa relevan. Data sekunder yang dikumpulkan bertujuan untuk memperdalam data dan mendukung keabsahan analisis.

Hasil dan Pembahasan

Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)

Berdasarkan dokumen Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ 2), GEDSI merupakan suatu perspektif yang diperlukan untuk mengembangkan proses pembangunan dengan menekankan pentingnya konteks kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial (Agustin et al., 2024). GEDSI merupakan suatu kerangka kerja yang berperan untuk membangun inklusivitas di dalam inisiatif pemberdayaan. Fokus utamanya adalah untuk menjamin adanya kesetaraan hak dan kesempatan bagi semua dan prinsip *leaving no one behind* atau tidak meninggalkan siapapun sebagai prasyarat untuk perbaikan proses pembangunan (Malihah et al., 2023).

Konsep ini menjadi penting dan relevan untuk diintegrasikan dalam intervensi pembangunan karena adanya marjinalisasi yang dialami oleh individu dan kelompok. Sebab, interseksi antara disabilitas dan gender merupakan suatu kesatuan yang menyebabkan perempuan dan disabilitas mengalami kekerasan yang berbeda dan lebih kompleks dibandingkan dengan laki-laki atau non-disabilitas (Wołowicz et al., 2022). Secara khusus di Indonesia, masih terdapat stigma terhadap disabilitas, terabaikannya hak, juga minimnya keterlibatan aktif disabilitas ke dalam proses pembangunan (Nainggolan, 2023).

Lebih lanjut, terdapat tiga elemen utama yang saling berkaitan

dalam proses pemberdayaan masyarakat yang inklusif dan berkeadilan. Pertama, kesetaraan gender yang berarti hak, tanggung jawab, dan kesempatan yang setara bagi semua orang tanpa memandang jenis kelamin. Kedua, aspek disabilitas yang berfokus pada menghilangkan hambatan yang dialami oleh individu maupun kelompok dengan ragam disabilitas. Hambatan tersebut dapat berasal dari lingkungan, sosial, atau kebijakan diskriminatif yang membatasi partisipasi mereka dalam proses pembangunan. Ketiga, inklusi sosial dalam GEDSI menjelaskan potensi individu dan komunitas dari ragam latar belakang (etnis, ras, usia, agama, orientasi seksual, dsb) untuk dapat berperan aktif secara sosial, ekonomi, dan politik dalam praktik pembangunan. Selain itu, GEDSI dianggap sebagai prasyarat penting untuk pembangunan yang berkelanjutan dengan memastikan bahwa terdapat keterlibatan dan kesempatan yang setara untuk mencapai potensi diri dalam aspek ekonomi, sosial, dan politik.

Krisis Sampah di Yogyakarta: Mendesak Intervensi Program Krisis Iklim yang Inklusif dan Partisipatoris

Sampah yang tidak dikelola dengan baik menjadi salah satu penyumbang emisi gas rumah kaca, terutama metana (CH₄), akibat dekomposisi sampah organik dan pembakaran sampah. Data dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) DIY tahun 2023 menunjukkan peningkatan volume produksi sampah di Yogyakarta selama 3 tahun terakhir, yaitu 1.133,94 ton (2021), 1.231,55 ton (2022), dan 1.231,55 ton (2023). Di sisi lain, kapasitas pengolahan sampah oleh pemerintah terus menurun, yakni 893,53 ton (2021), 757,72 ton (2022), dan 756 ton (2023).

Pertumbuhan populasi diperkirakan akan semakin memperparah volume sampah, yang apabila tidak direspon dengan pengelolaan yang efektif, akan memperburuk krisis lingkungan dan mempercepat perubahan iklim. Sebagai organisasi non-pemerintah yang bergerak di bidang kesehatan seksual, reproduksi, dan pemberdayaan masyarakat, PKBI DIY telah merespons masalah ini dengan menyelenggarakan program edukasi, pelatihan, dan festival yang bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat akan pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

Namun, kompleksitas krisis sampah dan dampaknya terhadap

perubahan iklim menuntut adanya intervensi program yang lebih inklusif dan responsif terhadap keragaman sosial di Yogyakarta. Konsep GEDSI (*Gender Equality, Disability, and Social Inclusion*) menawarkan perspektif yang relevan dalam merancang program pengelolaan sampah yang berkeadilan dan menyeluruh. Secara khusus, PKBI DIY mengimplementasikan beberapa strategi utama:

1. **Pelibatan multi-pihak dalam perancangan program**
Melibatkan pemerintah, sektor swasta, komunitas, dan akademisi dalam merancang serta melaksanakan program pengelolaan sampah yang inklusif. Kolaborasi lintas sektor ini bertujuan untuk menciptakan program yang berkelanjutan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
2. **Pengembangan target terukur dan strategi berkelanjutan**
Menetapkan target yang spesifik dan strategi berkelanjutan untuk memastikan dampak jangka panjang. Program yang dikembangkan berdasarkan hasil analisis GEDSI mampu mempertimbangkan berbagai kebutuhan kelompok marjinal sehingga perubahan yang dihasilkan dapat bertahan lama.
3. **Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk edukasi**
Menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam edukasi dan pelatihan untuk meningkatkan akses terhadap pengetahuan pengelolaan sampah dan manajemen pengetahuan dalam mendukung keadilan iklim.
4. **Pelatihan dan pendampingan dalam pengelolaan sampah**
Memberikan pelatihan dan pendampingan kepada masyarakat mengenai pengelolaan sampah berkelanjutan, yang meliputi pemilahan sampah, pengolahan sampah organik, dan daur ulang. Program ini juga disesuaikan dengan kebutuhan spesifik kelompok perempuan dan penyandang disabilitas.
5. **Partisipasi aktif kelompok marjinal**
Memastikan partisipasi aktif perempuan dan penyandang disabilitas dalam program pengelolaan sampah. Pendekatan ini memastikan bahwa program pengelolaan sampah tidak hanya inklusif secara teori, tetapi juga secara praktik.
6. **Kampanye edukasi dan kesadaran publik**
Melakukan kampanye edukasi dan kesadaran tentang pentingnya

pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan dampaknya terhadap perubahan iklim. Kampanye ini disampaikan melalui berbagai media dan bahasa yang mudah dipahami oleh berbagai kelompok masyarakat.

PKBI Peduli Iklim: Memperluas Kesadaran Krisis Iklim Melalui Pendekatan Partisipatoris

1. Pemetaan Masalah dan Peningkatan Kapasitas Mitra

Berdasarkan keterangan program manager PKBI DIY, sejak awal program ini berlangsung, mitra masyarakat didorong untuk berpartisipasi aktif. Kegiatan yang dilakukan berdasarkan kebutuhan dan permasalahan yang ada di lingkungan masing-masing. Pada awal berjalanya program keadilan iklim, masyarakat dilibatkan dalam memetakan masalah yang berkaitan dengan lingkungan dan krisis iklim. Hasil dari pemetaan masalah tersebut ditindaklanjuti dengan peningkatan kapasitas mitra sebagai salah satu bentuk solusi. Secara umum, ada kesamaan masalah lingkungan yang dialami oleh masing-masing daerah, yakni belum adanya kesadaran untuk memilah dan mengolah sampah, kekeringan berkepanjangan, dan sektor kelembagaan pendukung yang perlu pengembangan. Berikut adalah ide yang ditindaklanjuti pada masing-masing daerah:

a. Kalurahan Wonokerto, Kabupaten Sleman

Pelatihan pemanfaatan maggot dan pelatihan pengolahan air hujan dengan tujuan mengatasi masalah kekeringan dan penumpukan sampah organik agar dapat bermanfaat untuk pertanian masyarakat. Pelatihan pemanfaatan maggot ini bermitra dengan Lentera Mahika, sebuah lembaga pertanian integratif. Hasilnya, muncul rencana lanjutan untuk mendiskusikan ide membangun TPS integratif di kalurahan ini.

b. Kalurahan Palbapang, Kabupaten Bantul

Mengadakan pengolahan sampah organik, pelatihan pembuatan sabun dari minyak jelantah, dan pelatihan diversifikasi pangan lokal untuk pemenuhan gizi seimbang bagi ibu dan anak. Berkolaborasi dengan mahasiswa dari beberapa universitas, pelatihan ini berhasil membuat lebih dari 20 perempuan di

- kawasan ini mampu mengolah sampah organik menjadi eco-enzim.
- c. Kalurahan Wunung, Kabupaten Gunungkidul
Salah satu upaya untuk mengembangkan pengolahan sampah dan kelembagaan desa di wilayah ini adalah dengan melakukan pelatihan dan pendampingan optimalisasi bank sampah. Sampai saat ini, bank sampah dari desa Wunung beroperasi dengan keanggotaan mayoritas dari perempuan kader desa.
- d. Kalurahan Bumirejo, Kabupaten Kulon Progo
Salah satu penyebab masalah lingkungan yang ada di wilayah ini adalah belum adanya kesadaran untuk menghemat energi dan mengolah sampah organik. Oleh karena itu, tim PKBI DIY melakukan pelatihan dan pendampingan berkala untuk membangun kebiasaan dalam menghemat energi, termasuk mengolah air untuk beradaptasi pada kekeringan. Selain itu, kondisi demografis warga yang mayoritas bekerja sebagai petani mendorong PKBI untuk melakukan pelatihan pengolahan sampah organik untuk dijadikan pupuk.
- e. Kelurahan Pringgokusuman, Kota Yogyakarta
Meningkat kondisi sosio-spasial yang berada pada wilayah urban dengan penduduk cukup padat. Sampah rumah tangga menjadi isu yang perlu diintervensi. Melalui pelatihan tata kelola sampah rumah tangga, tumbuh kesadaran dari masyarakat dan pemerintah desa untuk memilah sampah terlebih dahulu di tingkat rumah tangga.



Gambar 1. Pelaksanaan perencanaan program bersama masyarakat desa Wunung, Gunungkidul. (Sumber: Dokumentasi penelitian)
Ragam pelatihan dan pengorganisasian yang diadakan secara

berkelanjutan oleh PKBI DIY mencakup sesi teoritis dan praktis. Sesi teoritis berfokus pada diskusi dan mengembangkan pengetahuan dasar tentang jenis-jenis sampah, dampak sampah terhadap lingkungan, dan prinsip-prinsip pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Sementara, sesi praktis mengajak masyarakat untuk langsung terlibat dalam kegiatan pengelolaan sampah, seperti membuat kompos dari sisa makanan, mendaur ulang sampah, dan memanfaatkan sampah organik menjadi produk yang memiliki nilai tambah.

2. Mendorong Aksi Melalui Festival Ramah Lingkungan dan Edukasi Permak Pakaian

Salah satu fokus utama dalam program ini adalah peningkatan pengetahuan masyarakat terkait dengan krisis iklim. Krisis iklim bukan hanya mengancam lingkungan, tetapi juga menyebabkan krisis kemanusiaan yang mempengaruhi kelompok dimarjinalkan, termasuk perempuan dan penyandang disabilitas. Oleh karena itu, program ini berupaya memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada masyarakat dalam melakukan mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim.

Pendekatan yang diambil oleh PKBI DIY melibatkan perempuan dan penyandang disabilitas sejak awal perencanaan hingga implementasi program. Dengan demikian, program ini tidak hanya memberikan solusi umum, tetapi juga solusi spesifik sesuai dengan karakteristik dan permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing wilayah. Salah satu kegiatan yang disesuaikan dengan kultur di Yogyakarta adalah festival ramah lingkungan.



Gambar 2. Penampil tari tradisional pada Festival Keadilan Ikim. (Sumber: dokumentasi penelitian)

Festival Rakyat Keadilan Ikim bukan sekadar acara edukasi

dan aksi kolektif dalam menghadapi krisis iklim, tetapi juga perwujudan nilai-nilai budaya Yogyakarta yang kaya dan berkelanjutan. Pendekatan festival ini selaras dengan karakteristik budaya Yogyakarta yang menjunjung tinggi kearifan lokal, gotong royong, seni budaya, keberlanjutan, dan partisipasi inklusif.

Festival ini menerapkan konsep ramah lingkungan, seperti pembatasan plastik sekali pakai dan pengelolaan sampah terpadu. Hal ini mencerminkan prinsip penyatuan ilmu pengetahuan, yakni keseimbangan antara manusia dan alam menjadi prioritas utama. Penggunaan bahan-bahan alami dan ramah lingkungan dalam dekorasi dan kegiatan festival juga menjadi contoh nyata praktik berkelanjutan yang sejalan dengan nilai lokal.



Gambar 3. Praktik permak gratis bersama ibu-ibu Palbapang, Bantul. (Sumber: dokumentasi penelitian)

Saat festival berlangsung, di dalamnya juga melaksanakan praktik permak gratis dengan mengoptimalkan kemampuan perempuan. Layanan permak pakaian di festival ini bukan hanya memberikan keterampilan praktis, tetapi juga mengedukasi tentang pentingnya pengurangan limbah tekstil dan dampak pilihan konsumen terhadap lingkungan. Konsep ini didasari oleh fakta tingginya emisi karbon dari industri pakaian. Dengan mengajak masyarakat untuk "mereparasi" pakaian mereka, festival ini mendorong pengurangan konsumsi pakaian baru dan memperpanjang usia pakaian yang ada. Hal ini sejalan dengan nilai kearifan lokal yang menekankan pada pemanfaatan sumber daya secara maksimal dan meminimalkan pemborosan.

Festival ini tidak hanya berfokus pada satu wilayah, tetapi diadakan di 4 lokasi program: Palbapang, Pringgokusuman, Wunung, dan Bumirejo. Sementara di Wonokerto, pendekatan edukasi melalui studi tiru terbukti lebih efektif dan hasilnya diseminarkan di kalurahan setempat. Keterlibatan aktif masyarakat dalam persiapan, pelaksanaan, dan pengelolaan sampah festival menunjukkan budaya "saling asih, saling asuh, saling ngemong" yang dijunjung tinggi. Festival ini juga memberikan ruang bagi perempuan dan penyandang disabilitas untuk berpartisipasi aktif dalam edukasi dan aksi kolektif, mencerminkan nilai "gotong royong" dan "kepedulian terhadap sesama" yang dijunjung tinggi dalam budaya Yogyakarta.

Festival ini mengintegrasikan seni dan budaya sebagai media edukasi dan hiburan. Pertunjukan seni tradisional, pameran karya seni bertema lingkungan, dan workshop seni ramah lingkungan menjadi daya tarik festival yang menjangkau berbagai kalangan. Penggunaan seni dan budaya dalam edukasi merupakan ciri khas Yogyakarta, di mana seni dan budaya diyakini memiliki kekuatan untuk menyampaikan pesan secara lebih efektif dan mendalam.

Festival Rakyat Keadilan Iklim merupakan contoh nyata bagaimana budaya lokal dapat menjadi kekuatan dalam membangun masyarakat yang tangguh dan berkelanjutan dalam menghadapi perubahan iklim. Pendekatan festival ini terbukti efektif dalam memperluas kesadaran, mendorong aksi kolektif, dan menginspirasi perubahan perilaku masyarakat. Festival ini diharapkan dapat menjadi model yang dapat direplikasi di daerah lain untuk memperkuat upaya kolektif dalam menghadapi krisis iklim.

3. Membangun Kemandirian dan Inklusivitas Melalui Pelatihan Operator Bengkel Disabilitas

Mobilitas merupakan hak fundamental manusia yang sulit didapatkan penyandang disabilitas. Bagi penyandang disabilitas fisik seperti paraplegia, kendaraan bermotor modifikasi dengan roda tiga sering menjadi penunjang kehidupan sehari-hari. Namun, keterbatasan akses terhadap layanan bengkel yang mampu menangani kendaraan modifikasi ini menjadi hambatan utama dalam mobilitas mereka.

Jumlah penyandang disabilitas di DIY pada tahun 2018

sebanyak 27.094 dengan rincian yaitu 1) 5.208 orang di Kulonprogo, 2) 6.324 orang di Bantul, 3) 7.694 orang di Gunung Kidul, 4) 6.097 orang di Sleman, dan 5) 1.789 orang di Kota Yogyakarta. Dengan data tersebut, banyak penyandang disabilitas membutuhkan intervensi untuk menciptakan kemandirian. Menyadari tantangan ini, PKBI DIY mengambil langkah nyata dalam memberdayakan penyandang disabilitas melalui program pelatihan operator bengkel khusus. Program ini tidak hanya membekali mereka dengan keterampilan teknis dalam reparasi dan service kendaraan modifikasi, tetapi juga meningkatkan kemandirian dan kemampuan mereka dalam mengatasi masalah mobilitas yang dihadapi.



Gambar 4. Pembukaan bengkel disabilitas bersama Dinas Sosial, di Wonorejo, Sleman. (Sumber: dokumentasi penelitian)

Pelatihan ini memberikan dampak positif bagi disabilitas. Kemampuan mereka untuk memperbaiki kendaraan secara mandiri tidak hanya meningkatkan rasa percaya diri dan kemandirian, tetapi juga membuka peluang usaha baru dengan menyediakan layanan bengkel khusus bagi sesama penyandang disabilitas. Hal ini menjadi langkah konkret dalam mewujudkan inklusivitas dan kesejahteraan kelompok dimarjinalkan, terutama di tengah krisis iklim yang semakin mendesak.

Program PKBI DIY menunjukkan bahwa dengan pendekatan yang tepat dan spesifik, kelompok dimarjinalkan seperti penyandang disabilitas dapat menjadi berdaya dalam menghadapi berbagai tantangan, termasuk krisis iklim. Keterampilan dan kemandirian

yang diperoleh melalui pelatihan ini membuka jalan menuju masyarakat yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

4. Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis

Krisis iklim bukan hanya membawa dampak pada lingkungan, tetapi juga kesehatan masyarakat. Perubahan ekstrim dalam pola cuaca, seperti musim panas yang singkat dan musim hujan yang tidak terduga, dapat melemahkan kekebalan tubuh manusia dan meningkatkan risiko penyakit infeksi, gangguan pernapasan, dan masalah kesehatan terkait iklim.

PKBI DIY, dalam upaya merespon krisis iklim dan dampaknya terhadap kesehatan masyarakat, tidak hanya berfokus pada mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, tetapi juga pada penyediaan layanan kesehatan yang memadai bagi masyarakat yang terkena dampak. Salah satu langkah nyata yang dilakukan adalah dengan memberikan layanan kesehatan dasar secara gratis.



Gambar 5. Pelaksanaan cek kesehatan gratis di Bumirejo, Kulonprogo. (Sumber: Dokumentasi penelitian)

Melalui pemeriksaan kesehatan berkala di tingkat desa dan kelurahan, meliputi pemeriksaan kolesterol, asam urat, gula darah, tekanan darah, serta konsultasi kesehatan. Hal ini memungkinkan akses yang lebih mudah bagi masyarakat untuk memantau kondisi kesehatan mereka tanpa terbebani oleh biaya. Program ini bukan hanya tentang pemerataan akses kesehatan, tetapi juga tentang membangun ketahanan masyarakat dan mewujudkan keadilan. Dengan jaminan kesehatan yang mereka dapatkan, masyarakat memiliki kesempatan untuk hidup sehat dan beraktivitas secara produktif untuk mencapai cita-cita mereka.

Program kesehatan PKBI DIY telah menjangkau 3.710 orang

dan memberikan manfaat yang signifikan, seperti: (1) Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan dan pencegahan penyakit; (2) Pendeteksian dini penyakit dan penyediaan pengobatan yang tepat waktu; (3) Pengurangan beban biaya kesehatan bagi masyarakat; dan (4) Peningkatan kualitas hidup dan produktivitas masyarakat.

Program ini dirancang dengan mempertimbangkan prinsip inklusivitas dan partisipasi masyarakat. Hal ini coba diimplementasikan melalui upaya berikut ini: (1) Lokasi pemeriksaan kesehatan yang mudah diakses oleh masyarakat; (2) Alur pendaftaran dan pemeriksaan yang sederhana dan mudah dipahami; (3) Keterlibatan tenaga kesehatan lokal dalam pelaksanaan program; (4) Penyediaan informasi kesehatan yang mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat; dan (5) Pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan.

Pemberian layanan kesehatan dasar gratis oleh PKBI DIY merupakan salah satu contoh atas upaya kolektif bersama masyarakat dalam menghadapi krisis iklim dan membangun keadilan dalam akses terhadap kesehatan. Intervensi ini menunjukkan bahwa kesehatan bukan hanya hak individu, tetapi juga kolektif untuk membangun meminimalisasi dampak krisis iklim atas kesehatan, baik fisik, psikis, dan juga mental.

Menuju Climate Justice: Memperkuat Partisipasi dan Inklusi oleh PKBI DIY

Berdasarkan pemaparan atas program yang telah dilakukan, terdapat beberapa hal yang dapat dibahas secara konseptual. Pertama, secara prinsip, PKBI DIY menerapkan prinsip kesetaraan dengan pihak di luar PKBI DIY. Hal ini diwujudkan melalui hubungan kemitraan, baik kepada sektor privat, pemerintahan, maupun masyarakat umum. Dengan adanya hubungan kemitraan, ada upaya untuk membangun agensi serta keterlibatan secara aktif dan setara dalam setiap program yang dilakukan.

Hal ini cukup penting, mengingat masih terdapat pemberdayaan masyarakat yang dilakukan dari lembaga pemerintah maupun non-pemerintah yang memosisikan masyarakat sebagai penerima manfaat

saja (Hasimi, 2020) (Herdiana, 2019), alih-alih sebagai subjek aktif yang punya hak untuk terlibat dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya. Dalam konteks ini PKBI DIY telah berhasil menginternalisasi hal yang cukup fundamental dalam aspek GEDSI, yakni mengupayakan kesetaraan dalam membentuk inklusi sosial.

Kedua, meskipun program ini telah menyebutkan keterlibatan perempuan dalam beberapa kegiatan seperti pengelolaan sampah dan pelatihan diversifikasi pangan, tetapi bentuk keterlibatan yang diamati masih sebatas partisipasi praktis. Dalam konsep dasar pemberdayaan perempuan mencakup elemen kognitif seperti pemahaman tentang perempuan yang seharusnya tidak lagi dalam kondisi subordinasi (Dandona, 2015). Dalam konsep GEDSI mendorong kesetaraan gender yang tidak hanya sebatas keterlibatan dalam praktik pelaksanaan, melainkan juga memastikan bahwa kelompok yang dimarjinalkan memiliki akses yang sama dalam pengambilan keputusan, mulai dari perencanaan dan evaluasi (Malihah et al., 2023).

Meskipun telah terdapat upaya untuk meningkatkan pemahaman perempuan dan disabilitas tentang krisis iklim, tetapi program ini belum dapat memastikan bagaimana akses atas modal untuk menerapkan solusi krisis iklim secara mandiri, untuk memastikan bahwa inisiasi ini tidak berhenti saat PKBI DIY selesai menjalankan program.

Ketiga, meskipun program ini berangkat dari pandangan bahwa krisis air akibat perubahan iklim dapat menyebabkan marjinalisasi lanjutan bagi kelompok rentan, tetapi implementasi yang dilakukan masih dibutuhkan pengembangan pada aspek pembangunan fisik. Desain yang tersedia di banyak tempat secara mutlak membutuhkan penyediaan akses bagi penyandang disabilitas (fisik) untuk menghilangkan ketimpangan akses (Church & Marston, 2003). Oleh karena itu, program ini dapat mempertimbangkan pembangunan infrastruktur yang ramah terhadap disabilitas dan perempuan, seperti fasilitas sanitasi dan air bersih yang aman dan aksesibel bagi masyarakat, khususnya pada wilayah yang mengalami masalah akses air bersih, seperti pada Desa Wunung, Gunungkidul.

Selain itu, proses perancangan peraturan kelurahan yang

melibatkan PKBI DIY, pemerintah kelurahan, serta mitra perempuan dan disabilitas di 5 kelurahan dampingan dapat mencerminkan prinsip-prinsip GEDSI dalam perumusan kebijakan. Pertama, dari segi kesetaraan gender, keterlibatan perempuan dalam perancangan kebijakan dapat menciptakan dan/atau memperkuat peran mereka dalam pengambilan keputusan terkait krisis iklim, serta memastikan bahwa perspektif dan kebutuhan spesifik perempuan terkait lingkungan dapat diintervensi.

Pemberdayaan yang inklusif dan partisipatoris memberikan kesempatan setara bagi semua orang termasuk perempuan dan penyandang disabilitas. Mereka memiliki interseksionalitas saat kedua identitas tersebut berinteraksi dalam mengidentifikasi pengalaman diskriminasi dan kerentanan (Crenshaw, 1991). Kedua, aspek inklusi disabilitas terlihat melalui pelibatan mitra disabilitas dalam tiap tahapan proses memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan ramah disabilitas dan mampu menjawab kebutuhan khusus mereka dalam menghadapi krisis iklim. Ketiga, inklusi sosial juga tercermin dari pelibatan berbagai komunitas dan aktor yang beragam dalam penyusunan peraturan kelurahan, sehingga kebijakan yang dihasilkan mencakup kepentingan seluruh masyarakat.

Inisiatif ini mencerminkan kolaborasi untuk mengatasi krisis iklim dengan pendekatan yang berkelanjutan, di mana PKBI DIY bekerja sama dengan masyarakat dan pemerintah kelurahan untuk menciptakan peraturan yang mampu bertahan setelah program berakhir. Pendekatan ini dirancang agar masyarakat memiliki kapasitas dan kepemilikan terhadap kebijakan yang dibuat, memungkinkan mereka untuk melanjutkan respon keadilan iklim secara mandiri. Dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, peraturan kelurahan ini dapat menjadi landasan kebijakan yang kuat dan inklusif sesuai dengan prinsip GEDSI.

***Lesson Learn* bagi PKBI DIY**

Selama satu tahun pelaksanaan program keadilan iklim, ada beberapa aspek yang dapat menjadi fokus evaluasi, seperti integrasi sosio-spasial, pemberdayaan ekonomi hijau, dan integrasi hak asasi manusia (HAM). Dalam konteks ekonomi, program yang berfokus pada keadilan iklim harus memahami kondisi dan potensi ekonomi yang ada di masyarakat melalui asesmen awal agar intervensi yang dilakukan

sesuai dengan konteks sosio-ekonomi yang ada. Sebab, perubahan iklim berkaitan erat dengan aktivitas produksi dan konsumsi manusia. Oleh karena itu, perlu pendekatan yang mampu memperkenalkan alternatif kegiatan ekonomi yang ramah lingkungan.

Program keadilan iklim PKBI DIY mengindikasikan perlunya integrasi pendekatan hak asasi manusia (HAM) secara lebih komprehensif dan mendalam atas program pembangunan yang dilakukan oleh aktor-aktor pembangunan. Hal ini dapat dicapai dengan meningkatkan partisipasi aktif perempuan dan penyandang disabilitas dalam setiap tahap program, memperkuat mekanisme inklusi dan aksesibilitas, serta meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang hak-hak mereka dalam konteks krisis iklim dan pembangunan berkelanjutan.

Upaya mitigasi dampak krisis iklim terhadap akses air bersih dan ketahanan pangan bagi perempuan dan penyandang disabilitas perlu dilakukan secara multidimensi dan berkelanjutan. Pengalaman dari intervensi yang dilakukan dengan mengajarkan bahwa masih terdapat cukup banyak tempat yang mengalami krisis ketersediaan air bersih, kesulitan akses, juga keamanan dalam mengakses sumber air bersih. Terakhir, masih ada keterbatasan dalam konteks peningkatan resiliensi perempuan dan penyandang disabilitas terhadap penyakit yang muncul akibat krisis iklim. Selain itu, intervensi juga belum mendalam pada kesehatan psikis ataupun mental. Oleh karena itu, PKBI membutuhkan pendekatan holistik yang mencakup aspek mitigasi, pengobatan, dan peningkatan kapasitas, baik dari tenaga kesehatan PKBI, maupun masyarakat.

Kesimpulan

Program keadilan iklim PKBI DIY hadir sebagai solusi inklusif dan partisipatoris untuk mengatasi permasalahan krisis iklim. Program ini memberikan solusi konkret dalam meningkatkan kapasitas dan membangun resiliensi masyarakat dalam menghadapi krisis iklim. Pendekatan program ini menekankan pada pemberdayaan yang inklusif dan partisipatoris, terutama bagi perempuan dan disabilitas. Program ini juga meningkatkan kapasitas mereka dalam berbagai aspek, seperti pengelolaan sampah, pengurangan emisi karbon, komunikasi efektif, dan

responsif terhadap perubahan iklim. Produksi materi edukasi dan kampanye, serta kolaborasi dengan pemerintah setempat, menjadi strategi penting untuk memperluas jangkauan dan keberlanjutan program.

Namun, masih ada keterbatasan dalam pelaksanaan program ini, seperti jangkauan fokus intervensi yang terbatas di 5 desa yang tersebar di tiap kabupaten Daerah Istimewa Yogyakarta, kolaborasi program yang masih terbatas pada beberapa lembaga, dan kurangnya intervensi terfokus pada aspek lingkungan yang menyebabkan terhambatnya peningkatan kondisi sosio-spasial. Oleh karena itu, terdapat beberapa rekomendasi. Pertama, memperluas jangkauan program ke wilayah lain di DIY untuk menjangkau lebih banyak masyarakat. Kedua, meningkatkan kolaborasi dari ragam subjek dan metode. Ketiga, melakukan riset aksi lanjutan, seperti monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memantau dan mengevaluasi dampak program terhadap masyarakat, khususnya mitra.

Daftar Pustaka

- Agung. (2021, April 23). Menumbuhkan Kesadaran Masyarakat Jogja Untuk Iklim Yang Lebih Baik. *Universitas Gadjah Mada*. https://ugm.ac.id/id/berita/21048-menumbuhkan-kesadaran-publik-jogja-untuk-iklim-yang-lebih-baik/?utm_source=chatgpt.com
- Agustin, R., Hidayati, N. S., Fuad, B., Arus, J. D. M., & Khofiah, N. (2024). *Modul Lokalatih Pengarusutamaan Kesetaraan Gender, Disabilitas dan Inklusi Sosial (GEDSI) Mitra Organisasi Masyarakat Sipil AIPJ2*. Circle Indonesia.
- Arifah, Megawati, & Bando, N. (2021). Dampak Perubahan Iklim Dan Ketahanan Pangan Rumah Tangga: Sebuah Analisis Gender. In A. Rusli (Ed.), *Sustainability and Environmentally of Agricultural System for Safety, Healthy and Security Human Life*. Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan.
- Arifin, Z. (2020). Metode Penelitian Pendidikan. *Jurnal Al Himah*, 1(1).
- Church, R. L., & Marston, J. R. (2003). Measuring Accessibility for People with a Disability. *Geographical Analysis: An International Journal of Theoretical Geography*, 35(1), 83–96.
- Crenshaw, K. (1991). Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics, and Violence against Women of Color. *Stanford Law Review*, 43(6), 1241–1299.

- Dandona, A. (2015). Empowerment of Women: A Conceptual Framework. *The International Journal of Indian Psychology*, 2(3), 35–45.
- Hasimi, D. M. (2020). Analisis Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Manajemen Bisnis Islam*, 1(1), 61–72.
- Hemmati, M., & Röhr, U. (2009). Engendering the climate-change negotiations: experiences, challenges, and steps forward. In G. Terry (Ed.), *Climate Change and Gender Justice* (1st ed.). Practical Action Publishing.
- Herdiana, D. (2019). Peran Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata Berbasis Masyarakat. *Jurnal Master Pariwisata (JUMPA)*, 6(1), 63–86.
- Humas. (2024, December 3). Bukti Kesuksesan Penyandang Disabilitas di Ruang Publik Berkat Penyediaan Dukungan dan Peluang. *Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan*, 1. <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2024/12/bukti-kesuksesan-penyandang-disabilitas-di-ruang-publik-berkat-penyediaan-dukungan-dan-peluang#:~:text=Berdasarkan data Badan Pusat Statistik,%2C5%25 dari total populasi.>
- Leon, Y. (2024, October 13). Suhu DIY Naik Signifikan, Perubahan Iklim Jadi Ancaman Serius. *Harian Jogja*. https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2024/10/13/510/1191321/suhu-diy-naik-signifikan-perubahan-iklim-jadi-ancaman-serius?utm_source=chatgpt.com
- Malihah, E., Nurbayani, S., Komariah, S., Utami, L., Munggaran, R. A., Rizkia, A. A. K., Yusup, A., Fadhillah, F. A., & Pratama, R. P. (2023). Community-Based Social Capital: The Key to Inclusive Political Initiatives from Gender Equality, Disability, And Social Inclusion (GEDSI) Perspective. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 32(2).
- Nainggolan, Y. (2023). Penyandang Disabilitas Dan Perubahan Iklim: Hambatan Dan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Penyandang Disabilitas Serta Hak-Hak Yang Terabaikan. *Jurnal Hak Asasi Manusia*, 16(2).
- Putra, A., Velisa, M., & Pamungkas, E. A. (2024). Pendampingan Keluarga Dalam Program Parenting Education Terintegrasi Literasi Perubahan Iklim Berbasis “Bantal Guling Bercerita” Di SPNF-SKB Kota Bengkulu Untuk Masyarakat Pesisir Desa Kuala Lempuing. *Journal of Community Empowerment*, 2(2).
- Raco, J. R. (2010). *Metode penelitian kualitatif: jenis, karakteristik dan keunggulannya* (A. L (ed.)). Grasindo.
- Stein, P. J. S., Stein, M. A., Groce, N., Kett, M., Akyeampong, E. K., & Alford, W. P. (2024). Advancing Disability-Inclusive Climate Research and Action, Climate Justice, and Climate-Resilient Development. *The Lancet*

- Planetary Health*, 8(4).
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan*. Alfabeta.
- Sultana, F. (2014). Gendering Climate Change: Geographical Insights. *The Professional Geographer*, 66(3), 372–381.
- Terry, G. (2009). Introduction. In G. Terry (Ed.), *Climate Change and Gender Justice* (1st ed.). Practical Action Publishing.
- The Paris Agreement, Pub. L. No. 21, 60 (2016).
- Wheeler, T., & Braun, J. von. (2013). Climate Change Impacts on Global Food Security. *Science*, 341(6145), 508–513.
- Wołowicz, A., Król, A., & Struzik, J. (2022). Disabled Women, Care Regimes, and Institutionalised Homophobia: a Case Study From Poland. *Sexuality Research and Social Policy*, 19(1), 777–789.
- Zed, M. (2004). *Metode Penelitian Kepustakaan* (1st ed.). Yayasan Obor Indonesia.